



Koran	Hal
Haluan	
Padang Ekspres	15/216
Singgalang	
Pos Metro	
Zaman	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

# Komit Wujudkan Nol Kerugian Negara

**Padang, Padek**—Berbagai kemajuan yang dicapai daerah di Sumbar hingga saat ini tidak terlepas dari peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK tidak hanya terus mendorong terciptanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun juga mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang akurat dan sesuai fakta di lapangan serta nol kerugian negara.

"Kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah. Terus memperbaiki diri dan meningkatkan kapasitas. Dengan demikian, kerugian negara bisa mencapai nol rupiah," ujar Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Pemut Aryo Wibowo saat menerima kunjungan silaturahmi Pemred *Padang Ekspres* Heri Sugiarto bersama Penjab Iklan *Padang Ekspres Group* Mukhtisar di ruangan kerjanya, kemarin (16/4).

Menurut Pemut, BPK dalam pemeriksaan keuangan daerah tidak hanya percaya pada laporan yang diterima, namun juga menganalisis



RUDI EFENDI/PADEK

**PERKUAT KEMITRAAN:** Kepala BPK Perwakilan Sumbar Pemut Aryo Wibowo (tengah) dan staf bersama Pemred *Padang Ekspres* Heri Sugiarto (dua kiri) dan Penjab Iklan *Padang Ekspres Group* Mukhtisar (dua kanan), di Kantor BPK Sumbar, kemarin.

dari sisi belanja.

Oleh sebab itu, harus ada kesesuaian antara laporan dengan implementasi di lapangan, agar laporan tersebut tidak bermasalah.

Dicontohkannya, dalam sebuah belanja di dinas, ada anggaran untuk pengadaan barang dan jasa. Apa yang dilaporkan harus sesuai dengan

yang dibelanjakan. Misalnya, anggaran untuk beli mobil A, maka yang dibeli harus mobil A itu. "Jika tidak ada kesesuaian atau mobil yang dibeli adalah jenis lain, maka laporan tidak diterima. Uang negara wajib dikembalikan sesuai dengan harga mobil A," kata Pemut.

Dengan sistem seperti itu, kata Pemut, ada efek jera. Pe-

merintah daerah tidak bisa sembarangan dalam membelanjakan anggaran. Seluruh instansi termasuk para rekanan harus berkomitmen menggunakan anggaran sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan perundang-undangan.

➔ Baca Komit...15

## Komit Wujudkan Nol ...

Sambungan dari hal.16

"Alhamdulillah, saat ini laporan keuangan di masing-masing daerah sudah mulai baik. Dan, semua kepala daerah mempunyai komitmen mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang mempunyai visi dan misi yang jelas serta tertata dengan baik," jelasnya.

BPK terus mengajak pemerintah daerah untuk terbuka. BPK selalu siap diminta arahnya, jika ada yang menghadapi keraguan dalam pengelolaan keuangan. "Kami rutin melakukan edukasi, peninjauan dan mengawasi setiap belanja pemerintah," katanya.

Di sisi lain, BPK memberi peluang kepada kalangan akademisi untuk saling bersinergi. Saat ini BPK masih kekurangan laboratorium yang mampu menunjang ke-

giatan operasional. Selain itu, data laporan hasil pemeriksaan (LHP) bisa diakses oleh publik.

"Bukan hanya teman-teman media, para mahasiswa yang ingin memperoleh data LHP untuk tujuan penelitiannya, kami juga siap memberikan. Asalkan data tersebut jelas siapa yang meminta dan pemanfaatannya untuk apa," katanya.

Tidak hanya itu. BPK juga siap menerima pertanyaan dan menindaklanjuti laporan temuan dari masyarakat terkait belanja di suatu daerah atau instansi. Caranya, bisa mengunjungi *website* BPK atau datang langsung ke kantor BPK.

"Begitu juga jika ada oknum pegawai BPK yang dicurigai berbuat macam-macam, masyarakat kita minta untuk melaporkannya lewat *website* atau datang ke kantor kami," tegasnya. (cr23)